

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SENGKETA
PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU
(STUDI KASUS BAWASLU MAMUJU TENGAH)**



Skripsi

Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Wahyudiansyah AS

NIM: 10500113062

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudiansyah AS
NIM : 10500113062
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh BAWASLU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan ataupun pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 15 Juli 2020

Penulis,



Wahyudiansyah AS

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Wahyudiansyah, Nim: 10500113062**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh BAWASLU**", memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 13 Agustus 2020


Pembimbing I


Dr. Andi Safriani, S.H., M.H
NIP: 198311222009122002

Pembimbing II


Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
NIP: 197402142008011009

Penguji I


Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
NIP: 19821207200911010

Penguji II


Dr. Hamsir S.H.M.Hum
NIP: 196104041993031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)” yang disusun oleh Wahyudiansyah AS, NIM: 10500113062, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Agustus 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 18 Agustus 2020 M

Muharram 1442 H

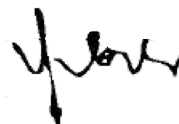
DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd | () |
| 3. Munaqisy I | : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H | () |
| 4. Munaqisy II | : Dr. Hamsir, S.H., M.Hum | () |
| 5. Pembimbing I | : Dr. Andi Safriani, S.H., M.H | () |
| 6. Pembimbing II | : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H | () |

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag

Nip. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kiamat.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh BAWASLU”** ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap akhir pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Sistem Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dengan semua keterbatasan yang penulis miliki, selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT. Kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan ketekunan, ketulusan dan kesabaran.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Alm. Agussalim dan Ibunda Salbiati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material selama ini. Tak akan pernah cukup

kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

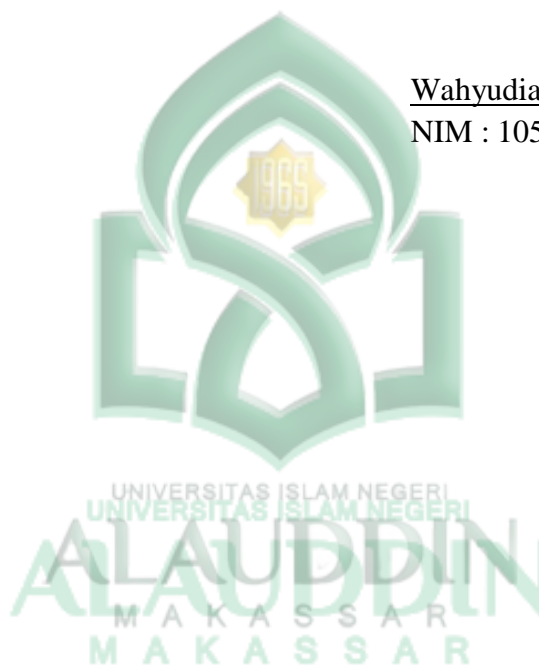
1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D, serta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Abd. Rais Asmar S.H., M.H.
4. Pembimbing I, Dr. Andi Safriani S.HS M.H. dan pembimbing II, Ashabul Kahpi S.Ag M.H. yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I Dr. Hamsir S.H M.H.,, Penguji II, Dr. Rahman Syamsuddin S.H M.H yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Kakak, adik selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini.
7. Terkhusus untuk adidnda tersayang Wardani S.Kom yang tiada henti memberikan support, perhatian serta saran dalam pembuatan skripsi ini.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima

dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.Aamiin.

Makassar, 25 Agustus 2020
Penyusun,

Wahyudiansyah AS
NIM : 10500113062



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-23
A. Tinjauan Teori Bawaslu	10
B. Sengketa Pemilihan Umum.....	11
C. Tinjauan Pemilihan Umum	18
D. Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana	22
BAB III METODE PENELITIAN	24-27
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Pendekatan Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Metode Pengumpulan Data	25
F. Instrumen Penelitian.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Pengujian Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28-49
A. Sejarah Singkat Bawaslu	28
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu.....	32
C. Penanganan Tindak Pemilu Oleh Bawaslu	35

C. Hambatan-Hambatan Tindak Pidana Pemilu	47
BAB V PENUTUP	50-51
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52-53
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Nama : Wahyudiansyah AS
NIM : 10500113062
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kata Kunci: Bawaslu, Tindak Pidana, Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Pemilu merupakan dianutnya prinsip demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara yang berdaulat berhak ikut berpartisipasi dalam politik. Keanekaragaman bangsa kita baik dalam bidang sosial, budaya, dan agama semakin menambah dimensi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Ada Banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya baik itu dari penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU), para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Diperlukan adanya pengawasan serta pemantauan yang komprehensif dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan Sampai pada penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelenggaraan pemilu yang di rancang selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu tersebut. Untuk itu dalam sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya selalu tersedia mekanisme kelembagaan yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi persoalan dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Kemudian berfungsi sebagai lembaga untuk memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Sengketa pemilu yaitu rangkaian penyelesain dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan,

persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi di seputar pemenuhan hak setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun dari partai politik.

Dengan adanya Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajarannya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.¹ Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Muncul kebijakan baru pada tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang adjudikasi, dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan sebagai hakim , memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Kemudian menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakan hukum pemilu.

¹ Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Dalam Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dilakukan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusan nya tidak bisa di asimilasi. Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu dapat menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi dapat dilaksanakan maupun tidak, kini keputusan nya semacam putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini.²

Dalam pembahasan mengenai Penyelesaian sengketa maka dalam sejarah peradilan Islam juga membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui wilayah al-qadha yaitu melalui lembaga peradilan dan juga dapat melalui lembaga non peradilan yaitu lembaga Tahkim meskipun ruang lingkup wewenang lembaga Tahkim tidak seluas lembaga al-qadha dalam menyelesaikan suatu sengketa. Tahkim berasal dari kata kerja Hakkama. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga Tahkim telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Lembaga Tahkimm juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Berbagai peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah juga menyelesaikan permasalahannya melalui lembaga Tahkim. Adapun dasar hukum lembaga Tahkim dijelaskan dalam Al-Qur'an surah 4, an-Nisa', ayat 35 menegaskan bahwa:

² Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

*Terjemahan: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*³

Dari ayat diatas ulama menjelaskan apabila terjadi persengketaan di antara pasangan suami istri, maka hakimlah yang melerai keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya.⁴

Atas dasar uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Syaamil Al-Qur'an, 2005), h.487

⁴Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 An-Nisa' 24-147*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset), h.115

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran khusus serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Bawaslu.
2. Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang dihadapi oleh Bawaslu ?
2. Bagaimana cara Bawaslu menangani penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum ?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sengketa pemilihan umum ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eka CW, 2015 dengan judul penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif *Electoral Justice System* menyatakan bahwa Pertama, dilihat dari kelengkapan dan kejelasan regulasi, masih adanya kelemahan dan

kekosongan pengaturan yang berpotensi penyebab munculnya sengketa pemilu.⁵ Adapun yang menjadi pembeda penelitian, pada penelitian ini penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif *Electoral Justice System*, sedangkan pada penelitian selanjutnya dalam perspektif tindakan hukum terhadap sengketa pemilu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Huda, 2011 dengan judul Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil Pemilukada Bengkulu Selatan meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi, karena adanya cacat yuridis sejak awal proses pencalonan H. Dirwan Mahmud. Kedua, dasar pertimbangan Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon adalah (a) hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Putaran Kedua. Dengan demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tidak berlaku, sehingga penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. (b) Dalam Pemilukada di Bengkulu Selatan yang sudah dilaksanakan 3 kali, Pemohon secara mutlak memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan calon lain. Pertimbangan hakim konstitusi yang memenangkan pasangan H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.M.A. tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008. Terbanyak dihitung sejak putaran pertama dan kedua yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

⁵Bambang Eka CW, dengan judul penyelesaian *sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif Electoral Justice System*

Dari kasus sengketa hasil Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan kita mendapat pelajaran yang berharga, bahwa proses demokrasi yang tidak dikelola secara professional dan ‘menerabas’ rambu-rambu peraturan perundang-undangan bukan saja merusak norma-norma hukum dan esensi demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi langsung yang sudah kita pilih. Ke depan, pelaksanaan Pemilukada harus dikelola secara professional, bermartabat dan penuh dedikasi. Dalam penelitian sebelumnya dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada penelitian selanjutnya dalam lingkup kewenangan Bawaslu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, 2014 dengan judul Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi menyatakan dapat disimpulkan : Pertama, bahwa sebaik-baik system penyelenggaraan pemilu adalah *system* yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang *legitimate* dan terpercaya; Kedua, secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum. Perbedaan penelitian, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat

di luar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lingkup kewenangan MK.⁶

4. Hamdan Zoelva, 2013 dalam penelitiannya yang berjudul *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi* menyatakan bahwa menunjukkan masih banyaknya agenda demokrasi yang harus kita selesaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum Pemilu, sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur negara. Namun, karena pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam posisi yang demikian, moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan.⁷ Dalam penelitian sebelumnya dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada penelitian selanjutnya dalam lingkup kewenangan Bawaslu.

⁶Firdaus, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*. 2014

⁷Hamdan Zoelva, dalam penelitiannya yang berjudul *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. 2013

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang dihadapi oleh Bawaslu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu politik tentang penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu khususnya bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenisnya.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai motivasi untuk mahasiswa maupun masyarakat Penelitian umumnya dan kalangan elit agar mengetahuai permasalahan yang dilalukan bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu .

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. Tinjauan Teori Bawaslu

1. Pengertian Bawaslu

Dalam undang-undang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah nama lembaga pengawas pemilu dalam tingkat nasional. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilihan umum membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Seperti halnya dengan mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan setiap dari setiap tahapannya. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengawalan suara tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi ikut berkontribusi dalam melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilihan umum bukan sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dalam proses Pemilihan umum. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk agar terwujudnya warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan dijadikan sebagai sarana dalam pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Untuk masyarakat, keterlibatan dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang sedang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Untuk penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk

senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, untuk penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan dan
- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.⁸

2. Sengketa Pemilihan Umum

1. Istilah Sengketa

Arti kata Sengketa disebut juga dengan Konflik. Perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum, begitupun sebaliknya. Masyarakat sekarang yang modern dengan berbagai kompleksitas permasalahan, tidak jarang timbul sengketa. Sengketa muncul karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas

⁸Ali Sidik dalam Jurnal "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum" 2016

perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi ketidaksesuaian. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa. Sementara itu, sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Sengketa terjadi jika ada salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya tersebut menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk mencari solusi penyelesaian sengketa yang muncul adalah sesuatu yang penting dalam masyarakat.

Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa. Berbagai bentuk penyelesaian sengketa baik secara formal maupun informal, dapat dijadikan landasan untuk menjawab sengketa yang mungkin terjadi asalkan hal itu menghasilkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, definisi secara umum sengketa pemilihan yaitu pertentangan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara dua pihak atau lebih terhadap objek tertentu dalam proses pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang menimbulkan perkara hukum.

2. Landasan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Penyelesaian berasal dari kata dasar “selesai” dan dalam KBBI, penyelesaian diartikan proses, cara, perbuatan menyelesaikan.⁹ Penyelesaian sengketa pemilihan diartikan sebagai proses atau perbuatan menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap objek tertentu dalam proses Pemilu sehingga terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat yang menimbulkan akibat hukum. Penyelesaian sengketa pemilihan umum merupakan proses atau bentuk untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang timbul dalam proses Pemilu. Rasionalisasi (berasal dari sebuah kata : rasional) adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu menurut pikiran dan pertimbangan yang logis (masuk akal). Maka berbicara mengenai rasionalisasi penyelesaian sengketa pemilihan adalah mempertanyakan apa landasan pertimbangan yang logis sehingga muncul dan dibutuhkan adanya penyelesaian sengketa pemilihan pada proses pilkada. Untuk itu, berbicara landasan atau dasar logis penyelesaian sengketa pemilihan maka adalah tepat jika kita bisa mempertimbangkan landasan mengapa norma penyelesaian sengketa itu berlaku atau diberlakukan, penyelesaian diartikan proses, cara, perbuatan menyelesaikan. Penyelesaian sengketa pemilihan umum yaitu sebagai proses atau perbuatan menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana para pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap objek tertentu dalam proses Pilkada sehingga terjadi pertentangan atau perbedaan persepsi yang menimbulkan akibat hukum. Penyelesaian sengketa pemilihan merupakan proses atau perbuatan untuk menyelesaikan

⁹Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) : www.kbbi.web.id, diakses tanggal 16 Oktober 2019

sengketa atau konflik yang timbul dalam proses Pemilu. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan dasar pertimbangan yang logis yang menyebabkan norma hukum penyelesaian sengketa pemilihan dalam aturan undang-undang atau peraturan perundang-undangan diberlakukan. Untuk itu, norma hukum penyelesaian sengketa dimaksud dapat diberlakukan karena adanya pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan politis, penjelasannya sebagai berikut:

1. Landasan Pertimbangan Secara Filosofis

Secara filosofis dimaksudkan hakikat dasar adanya penyelesaian sengketa dalam lapangan pemilihan kepada daerah. Norma hukum dipertimbangkan secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Untuk hal ini nilai filosofis negara RI terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorn*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas Kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhineka tunggal ikaan, soverenitas kerakyatan dan sosialitas keadilan bagi senganap rakyat Indonesia.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mengakhiri suatu konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu agar ada pegangan, acuan sehingga terjamin kepastian hukum atau dengan kata lain diperlukan legilitas norma (*legal norms*). Secara filosofis penyelesaian sengketa pemilihan berguna menjamin penegakan dan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

secara transparan dan efisien. Adanya suatu jaminan perlindungan hak setiap individu dan masyarakat apabila merasa ada kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat adanya konflik atau pertentangan kepentingan hukum dalam Pilkada. Maka dengan demikian dibutuhkan adanya jaminan bahwa penyelesaian perselisihan/pertentangan atau sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui sarana hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan secara transparan dan efisien. Jika mengacu kepada dasar pemikiran pembuat undang-undang tersebut, maka ketepatan : tepat cara dan tepat guna dalam norma penyelesaian sengketa pemilihan adalah tujuan yang dimaksud.

Seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk penyelesaian sengketa dalam tahapan mesti dilakukan secara tepat cara dan tepat guna untuk memastikan tidak terbuangnya waktu, tenaga dan biaya. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Secara filosofis penyelesaian sengketa pemilihan berguna menjamin penegakan dan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara transparan dan efisien.

Adanya suatu jaminan perlindungan hak setiap individu dan masyarakat apabila merasa ada kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat adanya konflik atau pertentangan kepentingan hukum dalam Pilkada. Maka demikian dibutuhkan adanya jaminan bahwa penyelesaian perselisihan/pertentangan atau sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui sarana hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan secara transparan dan efisien.

2. Landasan Pertimbangan Yuridis

Suatu norma berlaku secara yuridis apabila norma tersebut (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku

karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Maka dengan demikian, aturan juridis (*juridical rules*) penyelesaian sengketa termaktub di dalam (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015) sebagaimana diubah dengan (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015). Norma penyelesaian sengketa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Terkhusus terkait norma penyelesaian sengketa pemilihan dalam perundang-undangan yang sebelumnya tidak begitu cukup jelas mengaturnya sehingga dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih jelas dalam sebuah undang-undang. Sengketa pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwas, sebelum adanya undang-undang ini, tidak begitu jelas cakupannya atau jikapun ada maka masih perlu dipertegas. Adanya tuntutan pengaturan yang tegas dan jelas mendasari diaturnya norma penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagai sarana atau jaminan perlindungan hak setiap individu atau masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan.

3. Landasan Pertimbangan Sosiologis

Landasan pertimbangan sosiologis tentang Pilkada yang didalamnya diatur penyelesaian sengketa pemilihan adalah karena banyaknya timbul sengketa dan benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian bagi individu atau warga negara yang mengakibatkan terganggunya proses demokrasi pemilihan sehingga dapat menghambat pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

4. Landasan Pertimbangan Politis

Suatu norma hukum perundang-undangan dibentuk dan diberlakukan secara pertimbangan politis, apabila memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Dengan demikian, norma hukum penyelesaian sengketa, pasal 142 hingga pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, telah mendapatkan legitimasi kekuasaan, secara politis mendapatkan dukungan. Norma hukum ini diusulkan oleh eksekutif (pemerintah), Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapat dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum.

Dengan kata lain pertimbangan politis berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapai sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politis. Komisi II DPR RI, Risalah dibahas dan akhirnya disetujui oleh parlemen (DPR RI), sehingga norma ini menjadi bagian sistem norma hukum aturan Pilkada. Dengan demikian, maka gagasan untuk mewadahi dan mengusahakan adanya penyelesaian komplain atau keberatan itu ternyata jelas dan didasarkan pada pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan politis.

Sehingga dengan demikian untuk menjawab apa rasionalisasi atau pertimbangan hukum yang masuk akal (*ratio legis*) adanya penyelesaian sengketa menjadi jelas. Secara ringkas keseluruhan *ratio legis* yang membenarkan norma penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah adalah terletak pada perlunya jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan berdaya guna bagi semua pihak apabila timbul komplain atau keberatan yang terjadi dalam proses atau tahapan Pilkada.

Bahwa adanya aturan yang bersifat umum (peraturan perundangan) dan adanya jaminan perlindungan dari kesewenangan Pemerintah merupakan esensi yang harus terkandung agar tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Salah satu unsur utama negara hukum formal, berupa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah dalam konteks ini penyelenggara pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bila melanggar hak asasi warga negara sebagai akibat keputusan yang dikeluarkannya, harus ada peradilan administrasi yang menyelesaikannya.¹⁰

3. Tinjauan Pemilihan Umum

Demokrasi, pada awalnya merupakan satu gagasan tentang pola kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang tidak manusiawi di tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datangnya dari orang-orang yang berpikir idealis dan bijaksana. Mereka terusik dan tergugah melihat adanya pengekangan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai satu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*ekuality*), dan keadilan (*justice*). Dalam kenyataan hidup, ide tersebut direalisasikan melalui

¹⁰ Komisi II DPR RI, *Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Tahun Sidang 20012-2013), Rabu 13 Februari 2013, hal. 412

perwujudan symbol-simbol dan hakekat dari nilai-nilai dasar demokrasi sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri.¹¹ Sejalan dengan makin mendunianya demokrasi, pemikiran tentang demokrasi pun semakin berkembang. Tapi pada umumnya pemikiran itu berintikan tentang kekuasaan dalam Negara. Dalam Negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan demi kepentingan rakyat. Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Suatu pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila pemerintahan tersebut dapat memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi persaingan damai untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda, tanpa menysihkan bagian penting dari penduduk manapun dengan kekerasan.

Rezim-rezim demokratis dibedakan oleh kekerasan, legalitas, dan legitimasi berbagai organisasi dan himpunan yang relatif bebas dalam hubungannya dengan pemerintah dan dengan dirinya satu sama lain. Salah satu hal penting untuk memenuhi prasyarat tersebut diatas yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum, karena tidak ada demokrasi tanpa diikuti pemilihan umum yang merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Melihat struktur kepartaian yang demikian, konflik-konflik antara partai-partai politik yang ada di Indonesia pada dasarnya merupakan konflik antar sosial kultural berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan stratifikasi sosial. Tentu saja tidak dapat disangkal bahwa perilaku politik dari berbagai partai politik di Indonesia di dalam hubungannya satu sama lain jauh lebih kompleks daripada sekedar bersumber dari dalam perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan stratifikasi sosial.

¹¹ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, (CV. Rajawali. Yogyakarta.1985) hlm. 83

Kompleksitas itulah yang telah membuka kemungkinan membuka pola bagaimana cara melihat pola kepartaian dan perilaku politik yang diwujudkan oleh berbagai partai di Indonesia. Herbert Faith mengemukakan konflik-konflik politik di Indonesia sebagai konflik ideologi yang bersumber di dalam ketegangan-ketegangan yang terjadi antara pandangan dunia tradisional di satu pihak, dengan pandangan dunia modern di pihak lainnya.¹²

1. Arti Pemilihan Umum

Pada hakikatnya pemilu di Negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Pemilihan umum yaitu suatu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi. Esensinya sebagai sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.¹³

Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kendaraan politik, partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dalam negara.

¹²Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia suatu pengantar*. (Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998). h. 71

¹³Rusli Karim M, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*, (CV. Rajawali. Jakarta.1991) h. 120

Tetapi untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat partai politik terlebih dahulu harus memperoleh eksistensi yang dapat dilihat dari perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum yaitu sebuah sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, kepentingan rakyat perlu diwakali. Karena pada saat sekarang ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam kegiatan tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar. Maka dari itu partai politik menawarkan calon-calon untuk mewakili kepentingan rakyat. Pemilihan umum merupakan saat dimana partai politik bertarung untuk memperoleh eksistensi di lembaga legislatif.

1. Fungsi Pemilihan Umum

Dalam Negara demokrasi (pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat) maka salah satu ciri utamanya adalah pemilihan umum untuk memilih partai politik yang akan mendapat kepercayaan rakyat. Pemilihan umum merupakan gambaran yang ideal bagi suatu pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang stabil membutuhkan konflik atau pemisahan sehingga akan terjadi perebutan jabatan politik, oposisi terhadap partai yang berkuasa dan pergantian partai-partai berkuasa. Karena itu pemilu bukan hanya untuk menentukan partai yang berkuasa secara sah, namun jauh lebih penting dari adalah sebagai bukti bahwa demokrasi yang berjalan dengan stabil, dimana terjadi pergantian partai-partai politik yang berkuasa (Seymour Martin Lipset).¹⁴

2. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Pada dasarnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)

¹⁴Seymour Martin Lipset, *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1960) hlm. 1

b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

4. *Konsep penegakan hukum tindak pidana*

Sajipto Rahardjo, dalam buku Dedi Mulyadi menyatakan penegakan hukum merupakan rangkaian proses dalam menjabarkan nilai, ide, dan cita-cita yang cukup abstrak, dan menjadi realita dalam tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum membuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam wujud hukum berupa peraturan perundang-undangan.¹⁵

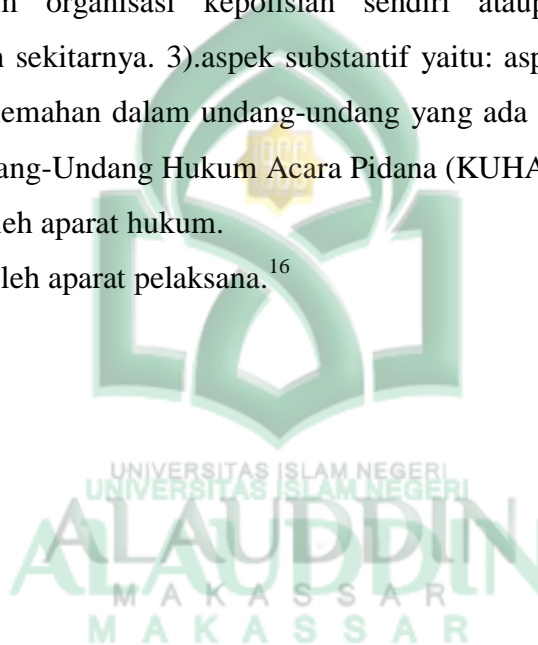
Penegakan hukum ialah penerapan hukum (acara) pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Dalam literatur hukum pidana di negara barat (Amerika) istilah penegakan hukum sebagaimana dimaksud, lebih dikenal dengan istilah “Criminal Justice System is the system by which society first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law”.

Artinya bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dimana masyarakat pertama-tama menentukan apa yang akan merupakan kejahatan dan kemudian mengidentifikasi tuduhan, mengadili, dan menghukum mereka yang melanggar hukum pidana. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan umum sama dengan penggunaan hukum pidana, sehubungan dengan penggunaan hukum pidana Von Feurbach dengan teorinya “*Psychologische Zwang*” yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan

¹⁵Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2013

suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi 1).aspek struktural yaitu: aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. 2).aspek kultural/budaya yaitu : aspek yang muncul pada diri aparat penegak hukum yang disebabkan adanya pengaruh dari aspek nilai dan sikap baik dari dalam organisasi kepolisian sendiri ataupun pengaruh dari lingkungan sekitarnya. 3).aspek substantif yaitu: aspek yang disebabkan adanya kelemahan dalam undang-undang yang ada dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Aplikasi oleh aparat hukum.
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.¹⁶



¹⁶Nurasariani Simatupang. Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*". Medan : Pustaka Prima. Halaman. 252-253.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana hanya mendeskripsikan informasi apa adanya dan menjelaskan informasi atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Jln. Pongtiku Kompleks Ruko Axuri Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

C. Pendekatan Penelitian

- a. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Yuridis Empirik adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dalam pelaksanaannya.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa informan, peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, dokumen dan arsip. Bahan kepustakaan dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mengatur.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku Hukum yang membahas mengenai tindak pidana pemilu, tujuan pembedaan,

penegakan hukum, serta artikel-artikel, makalah-makalah, seminar, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Sumber yang sangat penting dalam pengamatan kualitatif yaitu manusia yang berperan dalam posisi sebagai narasumber informan (Staff Bawaslu) untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara dalam bentuk wawancara mendalam.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis, dengan cara mengamati kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan tempat meneliti. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang terpercaya berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman data.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis memperoleh berbagai dokumen mengenai permintaan barang habis pakai (alat tulis kantor) yang dapat mendukung penyelesaian penulisan tugas akhir ini sesuai dengan pokok permasalahan dari pengamatan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari data-data dari dokumen, arsip, laporan dan literature lain yaitu yang berkaitan dengan Kewenangan Bawaslu dalam Mengatasi Sengketa Pemilihan Umum.

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, yang menjadi instrument penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “di

uji validasi". Uji validasi yaitu derajat ketepatan dari data yang terjadi antara objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti itu sendiri. Suatu instrument dinyatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tiga komponen pokok dalam analisis data, sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pengertian lain dari reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat didapatkan.

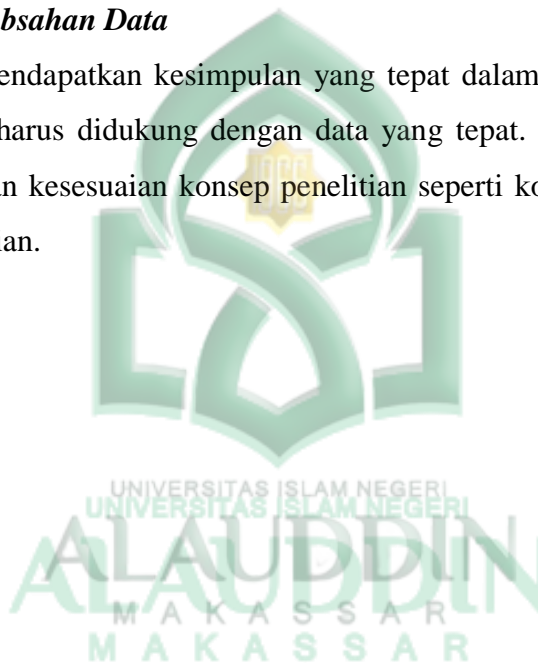
b) Penyajian Data

c) Penyajian data yaitu sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya sebuah kesimpulan. Dengan demikian, penyajian data yang di hasilkan baik dan jelas sistematikanya sangat diperlukan untuk melangkah ke tahapan penelitian kualitatif selanjutnya. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu proses akhir dalam penelitian dimana data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. Ketiga komponen yang satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen yang ada. Hal ini dimaksudkan dalam memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.

H. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif maka dari itu harus didukung dengan data yang tepat. Derajat kepercayaan menggambarkan kesesuaian konsep penelitian seperti konsep yang ada pada sasaran penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilahan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Adapun visi misi, tugas dan wewenang bawaslu yaitu:

I. Visi dan Misi Bawaslu

a. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.¹⁷

II. Tugas dan Wewenang pengawas pemilu

a. Bawaslu

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang

¹⁷ Halaman Website Bawaslu Sulawesi Barat <https://sulbar.bawaslu.go.id>

diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

b. Bawaslu Provinsi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilu”. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi. Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”.

Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi.

c. Bawaslu Kabupaten/Kota

Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Ditegaskan pula bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”. Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: “(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di atas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam KUHP

Dalam KUHP Inonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan”, adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan:”Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintangi orang lain dalam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.

2. Penyuapan

Pasal 149 KUHP menyatakan:” (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”. Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap. Pemilu 2019 yang lalu di Mamuju Tengah, kita banyak menemukan kasus-kasus yang bermotif ”money politic” yang sebenarnya bisa dikenakan pasal ini, misalnya pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih Partai A, B dan sebagainya. Namun, seperti diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diproses secara pidana.

3. Perbuatan Tipu Muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan : ”Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan

orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2009 banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2019 beberapa ditemukan adanya surat suara yang sangat berlebih yang dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.

4. Mengaku sebagai orang lain.

Pasal 151 KUHP menyatakan :”Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.¹⁸

5. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Pasal 152 KUHP menyatakan :”Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

¹⁸ <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, diakses dari situs tanggal 29 Januari 2020.

Secara umum KUHP (*lex generalis*) telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur : Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa pasal ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif a). Dengan kekerasan/ancaman sengaja merintangi orang menggunakan hak pilih; b). Menjanjikan/menyuap orang supaya tidak menggunakan hak pilih; c). Menerima janji / menerima suap; d). Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain; 1). memakai nama orang lain supaya dapat memilih; 2). menggagalkan pemungutan suara atau melakukan tipu muslihat agar hasil pemilihan lain dari yang seharusnya. Adanya orang perorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah merupakan unsur objektif dari pasal ini, yaitu bertujuan untuk menghalangi orang memberikan haknya dalam pemilu atau menyebabkan suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain , dengan melakukan: a) tindakan kekerasan/ancaman b) Memberikan janji/melakukan penyuapan c) Menerima janji / menerima suap d) Melakukan tipu muslihat.

Pasal 148-153 merupakan pasal-pasal yang berasal dari KUHP, yang pada umumnya menjamin agar supaya setiap warga negara dapat menentukan pilihannya dengan bebas terhadap wakil-wakil untuk duduk dalam Dewan pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dan agar Pemilu dapat dilakukan dengan bersih, jujur dan bebas dari segala macam kecurangan.

C. Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Bawaslu

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin. Demi terlaksananya pemilihan yang jujur dan bersih maka pemerintah membentuk suatu undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan peraturan untuk mengatur pelaksanaan pemilu. Dalam

menyelenggarakan pemilu maka pemerintah membentuk lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Penyelesaian tindak pidana Pemilu, Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir pemilihan umum dan sekaligus bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Tindak pidana pemilu (money politics) yang semakin merajalela dalam setiap kali diadakannya pemilu hal ini yang menjadikan Bawaslu harus bertindak tegas dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu tersebut. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), ini memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum (polisi). Sesuai ketentuan yang ada maka terhadap sengketa berupa tindak pidana pemilu (money politics) yang tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu melainkan oleh penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Dengan demikian Bawaslu/ Panwaslu tidak berwenang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana pemilu, jadi Bawaslu/ Panitia Pengawas hanya menerima laporan adanya tindak pidana pemilu dan kemudian melanjutkan kepada kepolisian.

Badan Pengawas Pemilu terbagi dalam beberapa bagian yaitu Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Tingkat kabupaten atau kota terdapat Panitia Pengawas Pemilu yang disebut dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Dalam tingkat Kecamatan terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Badan Pengawas Pemilu yang merupakan bagian dari lembaga yang menyelenggarakan pemilu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu sengketa pemilu. Penjelasan mengenai kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang No. 8 tahun 2012 memberi pengertian jelas tentang sengketa pemilu. Menurut undang-undang ini, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengertian itu, maka terdapat dua jenis sengketa, yakni: pertama, sengketa antar peserta pemilu, dan; kedua, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua sengketa itu disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa pemilu dijelaskan pada Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Bagian Ketiga Sengketa Pemilu Paragraf 1 Umum Pasal 257 menjelaskan bahwa Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi

antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara 4 Didik Supriyanto, Penguatan Bawaslu Optimaslisasi Posisi Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014, Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu mempunyai landasan yang kuat dalam Undang-undang no. 8 tahun 2012 dalam hal ini dijelaskan dalam Paragraf 2 Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 258 ayat 1 bahwa:6 "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu." Selain itu Peraturan Bawaslu No 15 tahun 2012 juga mengatur kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, yang dijelaskan pada bab 2 pasal 2 ayat 1 bahwa "bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu serta sengketa antara peserta pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota." Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pada Pasal 73 ayat 4 point d perubahan kedua atas Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga menerangkan tentang kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang mengatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang: menyelesaikan sengketa Pemilu".

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Keseluruhan Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dengan demikian jika dirinci maka dasar hukum yang digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862).
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu; (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon; dan (h) Pasangan Calon. Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.” Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan

Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu”. Lebih lanjut, Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1 KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Dalam hal sengketa proses yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, tindakan yang dimaksud adalah tindakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan keputusan.

Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 4A ayat (1). Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 4A ayat (2) kemudian mengatur lebih lanjut bahwa: Permohonan yang diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diregister dan dituangkan.

Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu, bahwa: (1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. (2) Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Partai Politik. Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”.

Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (1) serta Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:

- 1) Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain:
 - a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran

- b. Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4). Calon Peserta Pemilu yang dimaksud adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu juncto Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Apabila permohonan

yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan.

Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antarPeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Taufiq Walhidayat, S.Pd selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa) mengenai kasus pidana pemilu di Mamuju Tengah beliau mengemukakan bahwasanya Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi yang tindak pidana pemilunya masuk kategori terbanyak. Dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Mamuju Tengah ada banyak kasus yang tidak sampai pada tahap putusan di karenakan sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi

dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.¹⁹ Pada tahun 2019 ada 2 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani Bawaslu Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang sampai pada tahap putusan yaitu tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Arsil Aras dan Haris Halim terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Adapun Hasil keputusan dari kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang terjadi di Sulawesi Barat.

a) Kasus Tindak Pidana Arsil Aras

Memperhatikan, pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arsil Aras Alias Arsil Bin Aras telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau meteri lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

¹⁹ Taufiq Walhidayat, S.Pd selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa), wawancara, Mamuju Tengah, 15 Januari 2020

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bungkus gula pasir
 - Satu bungkus kopi
 - Mie instan 4 (empat) bungkus
 - Satu bungkus rokok
 - Satu lembar specimen surat suara Arsil Aras;
 - Satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari senin tanggal 27 mei 2019 oleh Andi Ardha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H.,M.H. dan Harwansah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

b) Kasus Tindak Pidana Haris Halim Sinring

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haris Halim Sinring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memebrikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) lembar kain sarung tanpa merek
 - 21 (dua puluh satu) lembar kartu nama Caleg DPRD Provinsi. Sulawesi Barat Dapil Mamuju Tengah atas nama Haris Halim Sinring;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

D. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya:

1. Tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh Bawaslu karena Bawaslu sendiri tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksisaksi sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap.
2. Regulasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya money politics, misalnya money

politics yang dilakukan pada masa kampanye, jika dilihat mengenai definisi kampanye yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa digunakan untuk menjerat adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dalam kasus money politics untuk menghindari jeratan hukum, peserta pemilu maupun caleg pada saat menyerahkan uang dan/ atau barang kepada masyarakat/ pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih.

3. Tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap money politics, dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketidaksediaan warga untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktek money politics tersebut adalah para pihak yang terlibat.
4. Terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, baik ditingkat pengawas pemilu maupaun ditingkat aparat penegak hukum. Satu sisi dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu menguntungkan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas pemilu dalam upaya mencari kelengkapan bukti dan saksi. Sebab dari waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam proses penyelesaiannya harus

5. menggunakan waktu yang singkat, agar tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.
6. Kepolisian dan/ atau Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dalam Undang-undang pemilu (UU No. 8 Tahun 2012) tidak memberikan kewenangan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dugaan pelanggaran pidana pemilu. Misalnya jika tersangka tidak hadir dalam penyidikan di kepolisian atau bahkan melarikan diri dan baru muncul pada hari ke 15 setelah diteruskan dari pengawas pemilu kepada Kepolisian, maka kepolisian tidak bisa menindaklanjuti karena daluwarsa ditingkat penyidikan.



V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk tindak pidana pemilihan umum di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yaitu dengan sengaja menjanjikan atau memeberika uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
2. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang adjudikasi, dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan sebagai hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya dan menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan.
3. Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.

B. Saran

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Anggota DPR Mamuju Tengah tahun 2019, sebaiknya mendapat penguatan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta kesadaran pasangan calon untuk bersikap kooperatif demi proses demokrasi yang baik.



Daftar Pustaka

- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 An-Nisa' 24- 147*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset), 115
- Ali Sidik dalam Jurnal “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)*”, 2016.
- A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 43
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, (CV. Rajawali. Yogyakarta.1985) hlm. 83
- Bambang Eka CW, 2015 dengan judul *penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif Electoral Justice System*
- Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama. 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Syaamil Al-Qur'an, 2005), 487
- Dwi Rezki Sri Astarini, Op. Cit., hal. 34
- Firdaus, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*. 2014
- Hamdan Zoelva, dalam penelitiannya yang berjudul *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. 2013
- Halaman Website Bawaslu Sulawesi Barat <https://sulbar.bawaslu.go.id>
- [Http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html), diakses dari situs tanggal 29 Januari 2020.
- Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia suatu pengantar*. (Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998). hlm. 71
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, 2010, hal 166

- Ni'matul Huda, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi*. 2011
- Nurasariani Simatupang. Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*". Medan : Pustaka Prima. Halaman. 252-253.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.
- Rusli Karim M, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*, (CV. Rajawali. Jakarta.1991) hlm. 120
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni. 1982. Hlm. 69-70.
- Seymour Martin Lipset, *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1960) hlm. 1
- Sri R. Werdiningsih, "Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya", dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*,..., p. 118.
- Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) : www.kbbi.web.id, diakses tanggal 16 Oktober 2019
- Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2002.
- Taufiq Walhidayat, S.Pd selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa), wawancara, Mamuju Tengah , 15 Januari 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 *Berisi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*
- Undang Undang No.15 tahun 2011 *tentang penyelenggaraan pemilu*
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 *tentang Pemilu*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

A. ALAUDDIN, Kampus II - Jl. H. M. Yasin Lingsi No. 36 Sempu Sundaarumata - Gowa Telp. 841879 Fax 8321400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1223 Tahun 2019

T E M A N G

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah

- | | | |
|--------------|--|---|
| Membaca | Surat Perintah
Nama
N. I. M.
Jurusan
Hari/Tanggal
Pukul
Jujur | Wahyu Barasyah
10400113052
Ilmu Hukum
Selasa, 17 Desember 2019
Ujian Seminar Proposal/Skrpsi
"Penerapan Hukum Tindak Pidana Gangguan Pemilahan Unsur oleh
Bawaku" |
| Menyampaikan | 3. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian/Skrpsi
4. Bahwa dengan tercapainya persyaratan dan ketentuan di atas maka perlu dibentuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skrpsi
5. Bahwa mereka yang terdapat namanya di atas lampiran Surat Keputusan ini diundang untuk menghadiri ujian untuk mengikuti Ujian Seminar dan mengikuti kegiatan tersebut | |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 201 Tahun 1993 Jo Nomor 252 B Tahun 1996 tentang Pembinaan Kuis dan Wewenang Mahasiswa dalam Surat Keputusan
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 225 Tahun 2018 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar | |
| Menetapkan | Menetapkan Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skrpsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut: | |
| Ketua | Dr. H. Muhtasham Wahid, S.H., M.H.
Sekretaris
Abdul Raza Azzah, S.H., M.H.
Penguji I
Dr. Hamsah Al-Husni
Penguji II
Dr. Wahman Syamsuddin, M.H.
Pengawas
1. R. Samsudin, S.E.
2. Muhi Ar-Rahman, S.H., M.H. | |
| Ketua | Panitia bertugas mengorganisir penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skrpsi
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIP/AA/PEN/KEP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019 | |
| Keempat | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya | |

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditentukan di : Samata Gowa
 Pada tanggal : 13 Desember 2019
 Oleh :
 Dekan
 Korespondensi : 3886/SH.01/KP.07.8/11/2019
 Tanggal 18 Desember 2019

Dr. H. Rahmatillah HL

Tembusan :
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : Tahun 2020

TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL SKRIPSI TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, adalah:

Menjabat	Suaid Permatasari	
	N a m a	Wahyudiningsih
	N i m	150311302
	Jurusan	Ilmu Hukum
	Hari/Tanggal	Selasa 25 Februari 2020
	Profil	Ujian Seminar Hasil Skripsi
Jabatan	Penegakan Hukum Tingkat Polres Sebagai Pemantau Umum	
	Jahid SAWADU	

- Membentang**
- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil Skripsi (Skripsi)
 - Bahwa dengan tercapainya persyaratan dan ketentuan di atas maka perlu diangkat Panitia dan Debat sebagai Panitia Hasil Perencanaan Skripsi
 - Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil Skripsi dan telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai mahasiswa tingkat lanjut.

- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Ketentuan Menteri Agama RI Nomor 109 Tahun 2001 Jo Nomor 222 B Tahun 1986 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
 - Ketentuan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2004 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 - Kepresidenan UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Peraturan Etika UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia dan Pengruji Ujian Seminar Hasil Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	Dr. Muammer Muhaddad Saedy, S.H., M.A.
Sekretaris	Mu. Hasbiyanti, S.H., M.H.
Pengji I	Dr. Hamid, S.H., M.H.
Pengji II	Dr. Rahman Saemadik, S.H., M.H.
Pembaca	1. M. N. S.
	2. M. N. S.

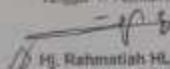
Ketua Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil Skripsi. Segala data yang diserahkan dan diserahkan oleh mahasiswa ke Panitia dan Debat sebagai Panitia Hasil Perencanaan Skripsi.

Ketua Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil Skripsi. Segala data yang diserahkan dan diserahkan oleh mahasiswa ke Panitia dan Debat sebagai Panitia Hasil Perencanaan Skripsi.

Ketua Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil Skripsi. Segala data yang diserahkan dan diserahkan oleh mahasiswa ke Panitia dan Debat sebagai Panitia Hasil Perencanaan Skripsi.

Dibaca di
Ruang Pabik
Retensi 2020

Kata Nomor: B-100251/0140/07/003/010/07
Tanggal: 17 Februari 2020


H. Rahmatiah H.

Tersusun
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Sempu – Gowa (Setelah Lampiran)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Ronang Polong – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 733 Tahun 2020

T E N T A N G

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2019
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :**

- Membaca** : Surat Permohonan Atas Nama **Wahyudiandiyah AS, NIM : 10500113062** Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi **Ilmu Hukum** tanggal 17 Juli 2020 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
- Mengingat** : b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disahkan sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U K A N

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif** sebagai berikut :

NAMA / NIM	TEAM PENJILIH			PELAKSANA SET/SEKOLAH
	MODERATOR & UJUL PRIBI	MODERATOR	MODERATOR	
Wahyudiandiyah AS 10500113062	Dr. Abdi Wijaya, M.Ag	Dr. Darsut S Puya, M.Ag	Istiqamah, S.H., M.H	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd Ilan Asrian, S.E., M.M

- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala Instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
- Keenam** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal dielakannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di : Ronang Polong

Pada tanggal : 17 Juni 2020



MUHAMMAD MUHAMMAD BAKRY

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa, Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1139 Tahun 2020

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Memeriksa** : Surat Pemohonan
- N a m a** : Wahyudiarsyah
- N i m** : 10500113062
- Jurusan** : Ilmu Hukum
- Hari/Tanggal** : Selasa, 18 Agustus 2020
- Prihal** : Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Judul** : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh BAWASLU"
- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 - Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1995 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Perfama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua** : Dr. H. Muammer Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
- Sekretaris** : Dr. Hj. Rahmatiah H., M.Pd
- Penguji I** : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
- Penguji II** : Dr. Hansir, S.H., M.Hum
- Pelaksana** : Hj. Suryani, S.Sos
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNSP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Tanggal : 14 Agustus 2020



Muammer Muhammad Bakry

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa; (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa, Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- 1031 /SH.O1/PP.00.9/08/2020
Sifat : Penting
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah/Skripsi**

Romang Polong, 14 Agustus 2020

Kepada Yth :

1. Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
2. Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd
3. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
4. Dr. Hamsir, S.H., M.Hum
5. Dr. Andi Safriani, S.H., M.H
6. Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
7. Pelaksana.

(Ketua)
(Sekertaris)
(Penguji I)
(Penguji II)
(Pembimbing I)
(Pembimbing II)

di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Wahyudiansyah
NIM : 10500113062
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020
Buka Sidang : 08.00 Wita
Pelaksanaan : Daring/ Online

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Muammar Muhammad Bakry

PENILAIAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL /SKRIPSI (S1)

Nama : Wahyudinayati

Nim : 10403113062

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul skripsi : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sampah Pemukiman Umum Oleh Bawahan"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA RATA
1.	Metode Penelitian/Peruisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata:	74 =	4

Samarata Gowa, 17 November 2018
Penilai,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL /SKRIPSI (S1)

Nama : Wahyudonejah

Nim : 10400113062

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul skripsi : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengaja Pemilikan Urutan Gaji Swasta"

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1	Metode Penelitian/Penulisan	4	
2	Materi	4	
3	Penguasaan/Analisa	4	
4	Cara Presentasi	4	
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	16 / 4 =	

Samata Gowa, 17 November 2019
Penilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL /SKRIPSI (S1)

Nama : Wahyudinayah
Nim : 10400113060
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul skripsi : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sangketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu"

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	74	

Samarata Gowa, 17 November 2019
Penilai,


Penilai, *Andi Supriatna, SH, MH*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL /SKRIPSI (S1)

Nama Walhyudiansyah

Nim 10400113002

Jurusan Ilmu Hukum

Judul skripsi "Penegakan Hukum Tindak Pidana Serbagata Pemilihan Umum Oleh Bawaslu"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentasi		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	M =	

Samata Gowa 17 November 2019

Penilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (ST)

Nama : Wahyudiandjati

NIM : 10500113002

PRODI : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Hukum Tingkat Putusan Simulasi Pemakaian Lembar Otak
SIMPULUS

NO	ASPEK YANG DINILAI	NIM	KATA-KATA
1.	Metode Penelitian/Pemilihan		
2.	Materi		
3.	Pengantar/Abstrak		
4.	Cara Penulisan		
	Survei		
	Aspek Aspek Hasil Rata		

Bekasik Pong, Februari 2020
Penilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

Nama : Wahyuchamsyah

NIM : 10500113062

PRODI : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh BAWASLU"

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1	Metode Penelitian/Penulisan	4	
2	Materi	4	
3	Penguasaan/Analisa	4	
4	Cara Presentasi	4	
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	16 / 4 =	4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Makassar, 16 Februari 2020

ALA UDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL SKRIPSI (S1)

Nama : Vahyudiningsih

NIM : 10601113042

PRODI : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : Penerapan Hukum Kitab Zakat Terhadap Pemilikan Uang Cash BAWASLU

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR	NATA RATA
1	Metode Penelitian/Referensi		
2	Isi/ Materi		
3	Penggunaan/Analisa		
4	Cara Penyampaian		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata		

Makassar, 27 Februari 2022
Penilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

Nama : Wahyudiansyah

NIM : 10500113002

PRODI : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh BAWASLU"

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan	?	?
2.	Materi	?	?
3.	Penguasaan/Analisa	?	?
4.	Cara Presentasi	?	?
	Jumlah	6	4
	Nilai Akhir Rata-Rata	6	4

Romang Polong, Februari 2020
Penilai:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDIN
MAKASSAR
Ashabul Kalfir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa
Tlp. (0411) 841079, Fax. (0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/ KOMPREHENSIP

Nama : WAHYUDIANSYAH AS

Nim : 10500113062

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh BAWASLU

Nilai Mata Kuliah				Jumlah Rata-rata
MKDU	MKDK	MKPP	Keseluruhan	
Dirasah Islamlah	Fikih/ Usul Fiqh	Ilmu Hukum		
3,8	3	4	10,8	4

Samata, 13 Agustus 2020

Kasubag,

Akademik Kemahasiswaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Mujahidh, S.E

Nip 196703091993032002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



WAHYUDIANSYAH lahir di Patulana 11 Desember 1995, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Putra dari pasangan Alm. Agussalim dan Salbiati ini memulai pendidikan di SDN Unggulan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2007. Pria yang akrab disapa Wahyu ini melanjutkan Sekolah Menengah Pertamanya di Madrasah Tsanawiyah Az-Ziyadah pada tahun 2007 hingga tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Az-Ziyadah pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

